



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN**  
**PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR**

Jalan Kapten Cok Agung Tresna No.4 Niti Mandala Telepon (0361) 236213 –  
236058 DENPASAR – 80235

web.: [www.ptun-denpasar.go.id](http://www.ptun-denpasar.go.id) e-mail: [info@ptun-denpasar.go.id](mailto:info@ptun-denpasar.go.id)

**PENGUMUMAN**

Nomor : 1522 /PTUN.W7.TUN.3/PENG/HK.2.7/XI/2025.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 1497/KPTUN.W7.TUN.3/HK.2.7/XI/2025, tanggal 13 November 2025 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Nomor: 1498/KPTUN.W7.TUN.3/HK.2.7/XI/2025, tanggal 13 November 2025, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014, Tanggal 9 Januari 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Jo. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor : 28/DJMT/Kep/III/2014, Tanggal 3 Maret 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, dengan ini diumumkan kepada masyarakat sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau Unit Kerja Advokasi Hukum pada Organisasi Profesi Advokat dan/atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, untuk mendaftar sebagai Pemberi Layanan Posbakum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berbentuk Badan Hukum.
2. Memiliki struktur kepengurusan lembaga.
3. Memiliki Akte Pendirian Lembaga dan perubahan Akte terakhir (jika ada).
4. Bukti domisili di wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
5. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan.
6. Memiliki minimal satu orang Advokat.
7. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum.
8. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan.
9. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang advokat atau Sarjana Hukum.

Adapun jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, hari Senin tanggal 24 November 2025 sampai dengan hari Jumat, tanggal 5 Desember 2025 (hari kerja)
2. Melakukan seleksi dokumen, hari Senin, tanggal 8 Desember 2025 sampai dengan hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025.
3. Mengadakan tes kualifikasi dan wawancara, hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025.
4. Memberikan penilaian dan menetapkan terhadap calon lembaga pemberi layanan Posbakum, hari Kamis tanggal 18 Desember 2025.
5. Pengumuman lembaga pemberi layanan Posbakum yang ditunjuk melalui Website Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, hari Senin tanggal 22 Desember 2025.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 24 November 2025.

PANITIA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA

POSBAKUM

K E T U A,

  
MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H.,M.H.